



Bank Syariah

AMANAH SEJAHTERA

Memberi Pelayanan Terbaik dan Islami

LAPORAN TAHUNAN TATA KELOLA YANG BAIK (GCG) PT BPR SYARIAH AMANAH SEJAHTERA



TAHUN 2024



www.amanahsejahtera.com



[bprs.amanahsejahtera](https://www.instagram.com/bprs.amanahsejahtera)

PT. BPRS AmanahSejahtera terdaftar dan diawasi oleh OJK



DAFTAR ISI

	halaman
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
I. PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA	1
II. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA	3
A. CAKUPAN PELAKSANAAN TATA KELOLA YANG BAIK	3
1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	3
2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS DAN DPS	6
3. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	6
4. REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI SELAMA TAHUN 2024	8
5. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH	9
6. REKOMENDASI PENERAPAN PRINSIP SYARIAH KEPADA DIREKSI	10
7. TANGGAL PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN DPS SEMESTER 1 DAN 2	11
B. HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA	11
1. MATRIKS PERINGKAT DAN TAHAPAN PENILAIAN (SELF ASSESSMENT)	11
2. HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA	12
3. KESIMPULAN HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA	13
C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI	14
D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR SYARIAH YANG BERSANGKUTAN	14
1. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI	14
2. HUBUNGAN KEKELUARGAAN ANGGOTA DIREKSI	14
E. RANGKAP JABATAN DIREKSI PADA BPR, BPR SYARIAH LAIN, DAN/ATAU LEMBAGA ATAU PERUSAHAAN LAIN	14
F. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR SYARIAH YANG BERSANGKUTAN DAN PERUSAHAAN LAIN	15
G. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR SYARIAH YANG BERSANGKUTAN	15
1. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	15
2. HUBUNGAN KEKELUARGAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	15
H. RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR, BPR SYARIAH LAIN, DAN /ATAU LEMBAGA ATAU PERUSAHAAN LAIN	15
I. RANGKAP JABATAN ANGGOTA DPS SEBAGAI ANGGOTA DPS PADA LKS LAIN	16
J. HUBUNGAN KEKELUARGAAN ANGGOTA DPS	16
K. PAKET ATAU KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DPS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN RUPS	16
L. KEPEMILIKAN SAHAM PARA PEMEGANG SAHAM PADA BPR SYARIAH YANG BERSANGKUTAN PADA TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023	17



M. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH	18
N. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS	19
1. PENYELENGGARAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN	19
2. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	20
O. FREKUENSI RAPAT DPS	20
1. PENYELENGGARAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN	20
2. KEHADIRAN ANGGOTA DPS	21
P. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD).....	21
Q. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR SYARIAH	21
R. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	22
S. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK	22
III. PENUTUP	24



LEMBAR PERSETUJUAN

Bismillahirrohmanirrohim

**LAPORAN TAHUNAN
TATA KELOLA YANG BAIK (GCG)
PT BPR SYARIAH AMANAH SEJAHTERA
TAHUN 2024**

GRESIK, 8 APRIL 2025
PT. BPR SYARIAH AMANAH SEJAHTERA

AMAT OEMAR ASNAR
KOMISARIS UTAMA

SUHERMAN ROSYIDI
KETUA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

MUSTAFA RIDHO
DIREKTUR UTAMA

BAB I PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

I. PENDAHULUAN

PT BPR Syariah Amanah Sejahtera yang beralamat di Jl. Kalimantan No.107 Perumahan Gresik Kota Baru Kabupaten Gresik Jawa Timur, dengan nomor telepon (031)3930204, berusaha menjadikan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai pondasi utama dalam menjalankan usaha dengan harapan perusahaan dapat memaksimalkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan menjaga keberlangsungan usaha.

Penerapan Tata Kelola yang Baik berdasarkan standard yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan secara konsisten, serta dibarengi perbaikan secara berkelanjutan, akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi BPR Syariah Amanah Sejahtera, yaitu:

1. Perseroan akan memiliki pondasi tata kelola perusahaan yang kokoh yaitu dalam hal kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang berkualitas sehingga dihasilkan proses tata kelola dan *outcome* yang memuaskan. Hal ini ditunjukkan melalui proses pengambilan keputusan yang lebih baik (transparan, obyektif dan mengikuti prosedur internal juga peraturan perundang-undangan), berkurangnya potensi benturan kepentingan, *fraud*, dan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), kegiatan operasional yang berjalan efektif serta kinerja perusahaan yang secara umum meningkat.
2. Meningkatnya nilai perusahaan (*corporate value*) yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja keuangan sehingga memberikan kepuasan kepada pemegang saham. Kepercayaan pemegang saham yang tinggi akan menghasilkan hubungan yang saling bersinergi dan harmonis sehingga akan berpengaruh positif terhadap perkembangan BPR Syariah Amanah Sejahtera ke depan.
3. Membentuk citra yang baik bagi BPR Syariah Amanah Sejahtera sebagai Bank Syariah. Dengan citra yang baik tentunya akan meningkatkan kepercayaan bagi nasabah, investor dan mitra bisnis untuk mengikat kerjasama dengan BPR Syariah Amanah Sejahtera.
4. Melaksanakan bisnis secara islami yang mendorong:
 - a. Kesadaran dan komitmen untuk meningkatkan ketakwaan, manfaat dan keberkahan dalam berbisnis.
 - b. Pengambilan keputusan bisnis didasarkan pada nilai akhlaq Islam dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dan prinsip syariah.
 - c. Kestinambungan entitas bisnis syariah melalui pengelolaan yang didasarkan pada praktik-praktik bisnis dengan karakter dan sifat-sifat Rasulullah SAW.
 - d. Kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap kemaslahatan ummat manusia dan kelestarian lingkungan.
 - e. Optimalisasi nilai bisnis syariah bagi pemangku kepentingan.
 - f. Pengembangan ekonomi Islam secara kuantitas maupun kualitas serta kemanfaatan yang universal.



5. Sebagai arahan strategis bagi perusahaan dalam mendukung tercapainya :

VISI BPR Syariah Amanah Sejahtera :

Menciptakan Bank Syari'ah yang mantap sebagai sarana untuk menggerakkan ekonomi umat menuju terciptanya kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berpendidikan dibawah naungan ridha Allah SWT.

MISI BPR Syariah Amanah Sejahtera :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito dengan prinsip syari'ah.
- Memberikan pembiayaan bagi pengusaa kecil, menengah dan masyarakat dengan prinsip bagi hasil dan jual beli untuk usaha yang halal, produktif dan menguntungkan
- Memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat muslim dalam menjalankan syari'ah Islam khususnya di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan

BAB II LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. CAKUPAN PELAKSANAAN TATA KELOLA YANG BAIK

1) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Hal yang menjadi Tugas dan Tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DIREKSI	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	MUSTAFA RIDHO	DIREKTUR UTAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS. 2) Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. 3) Menerapkan Tata Kelola yang Baik, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dan pada seluruh tingkatan organisasi 4) Menindaklanjuti temuan audit intern dan audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan otoritas lain 5) Menyusun struktur organisasi sesuai tata kelola yang baik dan kebutuhan perusahaan serta mengangkat Pejabat eksekutif termasuk yang melaksanakan fungsi audit intern; manajemen risiko; dan kepatuhan 6) Menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai yang memuat paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a) struktur remunerasi paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> 1. skala remunerasi berdasarkan tingkat dan jabatan; dan 2. komponen remunerasi; dan b) metode dan mekanisme penetapan remunerasi. <p>Dan Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi tersebut</p> 7) Menyetujui, menandatangani dan mengevaluasi Kebijakan dan SOP Kegiatan dalam Perusahaan 8) Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai. 9) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 10) Menyediakan data dan informasi terkait Bank yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada



			<p>stakeholder.</p> <p>11) Dalam melaksanakan tugasnya, dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional, sebagai tenaga ahli atau konsultan. Larangan tidak berlaku untuk penggunaan jasa profesional dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk proyek tertentu dengan karakteristik yang memerlukan keahlian khusus; Didasari perjanjian tertulis yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; dan Dilaksanakan oleh Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang memerlukan keahlian khusus sebagaimana dimaksud dalam poin 1. <p>12) Direktur Utama berkewajiban membuat anggota Direksi sebagai lembaga kolegial yang mampu bekerja sama dan masing-masing anggota berperan sebagai anggota tim dalam fungsinya masing-masing</p> <p>13) Mengkoordinir penyusunan RBB dan bertanggungjawab terhadap pencapaian RBB</p> <p>14) Bertanggungjawab untuk menjaga, memelihara dan mengembangkan kekayaan Perseroan dan menghasilkan laba</p> <p>15) Berwenang mewakili Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Baik di dalam maupun di luar pengadilan.</p> <p>16) Berwenang mengadakan rapat-rapat Direksi</p> <p>17) Berwenang melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan Bank, serta memberikan sanksi dan reward sesuai peraturan perusahaan yang berlaku.</p> <p>18) Berwenang mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meminjam uang dari pihak lain atas nama Perusahaan atau meminjamkan uang Perusahaan kepada pihak lain; Membeli, menjual membebani atau dengan jalan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas harta tidak bergerak serta perusahaan milik perseroan;
--	--	--	--



			<ul style="list-style-type: none"> c) Menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan perusahaan; d) Mengikat perusahaan sebagai penanggung/penjamin; Haruslah mendapat persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh sekurang-kurangnya dua orang komisaris dan satu diantaranya harus komisaris utama. <p>19) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perusahaan</p> <p>20) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perusahaan.</p>
2	RISMARINI	DIREKTUR OPERASIONAL DAN YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN	<p>1) Bersama Direktur Utama menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi secara Umum, terutama dalam memberikan opini manajemen risiko dan kepatuhan dalam Fungsi Kepersonaliaan, Kerumahtanggaan, Pendidikan, Keuangan, Teknologi Informasi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan.</p> <p>2) Menjalankan Tugas sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Membuat langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi. Baik kepatuhan secara umum maupun kepatuhan syariah. b) Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko di BPRS. c) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, kebijakan maupun SOP yang dimiliki Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . d) Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan maupun SOP yang dimiliki Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundangan, termasuk Prinsip Syariah

			<ul style="list-style-type: none"> e) Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan dan SOP, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan f) Berwenang memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinions) dalam hal terdapat keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan intern maupun eksternal dan Prinsip Syariah g) Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai ketentuan intern maupun eksternal serta Prinsip Syariah h) Bertanggung jawab mewujudkan budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi Bank i) Berwenang melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai j) Berwenang Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur Utama k) Berwenang melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah
--	--	--	--

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS DAN DPS**

Hasil Pengawasan Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti oleh Direksi

2) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Hal yang menjadi Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KOMISARIS	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	AMAT OEMAR ASNAR	KOMISARIS UTAMA	<ul style="list-style-type: none"> 1) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Agar pengawasan ini berjalan efektif, maka Dekom : <ul style="list-style-type: none"> a) Memberi nasihat kepada Direksi tentang penentuan visi, misi, budaya dan nilai-nilai Bank b) Melakukan kajian tentang strategi usaha yang diterapkan Bank



			<ul style="list-style-type: none"> c) Melakukan penilaian dan memberi nasihat atas sistem pengelolaan SDM, sistem pengendalian risiko dan Rencana Jangka Panjang dan Pendek Bank serta penjabarannya ke dalam RBB Tahunan Bank d) Memberi persetujuan atas rancangan strategi bisnis, kebijakan operasional Bank, prudential banking practices termasuk komitmen untuk menghindari benturan kepentingan e) Melakukan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk hal yang perlu ditindaklanjuti f) Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas: <ul style="list-style-type: none"> 1. Temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR Syariah, auditor ekstern; dan 2. Hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain g) Mengawasi secara periodik dan memberikan nasihat kepada Direksi atas penyelenggaraan tata kelola perusahaan h) Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RBB dan memberikan persetujuan atas revisi RBB i) Menyampaikan laporan pengawasan kepada OJK dan Pemegang Saham j) Mengawasi mutu pelayanan bank kepada nasabah k) Melakukan penilaian dan memberikan nasihat atas penerapan manajemen risiko mencakup pula hal-hal yang terkait dengan pengendalian fraud l) Menyusun program kerja Dekom. m) Menandatangani Kebijakan dan Prosedur yang berlaku di Perusahaan, serta mengevaluasinya secara berkala n) Mengevaluasi penerapan Kebijakan Pembiayaan dalam operasional perusahaan kemudian melaporkannya kepada OJK. 2) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Dekom dengan Direksi, Auditor Eksternal dan OJK 3) Menjaga kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS
--	--	--	--



			<ol style="list-style-type: none"> 4) Meneliti, menelaah dan menandatangani laporan tahunan yang disiapkan Direksi 5) Memberikan pendapat dan saran, kemudian mengesahkan RBB tahunan yang diusulkan Direksi 6) Memonitor perkembangan kegiatan Bank 7) Memberikan pendapat dan saran kepada pemegang saham mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank 8) Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Bank dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh 9) Memberitahukan kepada OJK tentang: <ol style="list-style-type: none"> a) pelanggaran peraturan perundangan di bidang keuangan dan perbankan b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank 10) Menyusun kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS; dan mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS. 11) Menyusun kebijakan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS; dan mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS 12) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi dan kebijakan nominasi 13) Menyampaikan laporan atas: <ol style="list-style-type: none"> a. pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR Syariah, secara daring melalui sistem pelaporan OJK 14) Menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib
2	MOCH. ALI MUCHID	ANGGOTA KOMISARIS	Membantu Komisaris utama dalam melaksanakan tugas dewan komisaris

REKOMENDASI KEPADA DIREKSI

- Nasehat Dekom untuk Direksi pada Rapat Dewan Komisaris tanggal 16 Januari 2024 :
 - 1) Terkait dengan permasalahan di tahun 2023, Dewan Komisaris memberikan nasehat agar ke depannya Direksi beserta jajarannya untuk lebih hati – hati (menerapkan prinsip kehati-hatian) dan meningkatkan kualitas SDI khususnya yang berhubungan dengan proses penyaluran dana

dan penyelesaian pembiayaan bermasalah

- Nasehat Dewan Komisaris untuk Direksi pada Rapat Dewan Komisaris tanggal 13 Februari 2024 :
 - 1) Meminta Direksi untuk selalu memperhatikan rekomendasi Audit, baik audit KAP maupun OJK
 - 2) Khusus terhadap nasabah bermasalah yang direkomendasikan KAP pada LHP 2023, dewan komisaris meminta direksi untuk membentuk biaya PPAP sesuai ketentuan
 - 3) Selalu berkonsultasi dengan pengawas OJK khususnya terkait kemungkinan revisi RBB tahun 2024
- Nasehat Dewan Komisaris untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Mei 2024 :
 - 1) Agar Direksi lebih ekspansif ke sector pembiayaan lain guna menggantikan sindikasi yang saat ini banyak bermasalah Direksi harus menjaga integritas dan mengedepankan profesionalisme serta prinsip kehati-hatian
- Nasehat Dewan Komisaris untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Juli 2024 :
 - 1) Terkait pencairan pembiayaan qard a.n. Jauhari alami, Dewan Komisaris memberikan catatan agar proses pencairan seperti ini tidak terulang kembali dan setiap pencairan pembiayaan yang berpotensi menjadi masalah atau menjadi perhatian pemeriksa, untuk di presentasikan terlebih dulu sehingga antar bagian terkait bisa memberikan masukan atau rekomendasi
 - 2) Dewan Komisaris memberikan arahan, untuk memberikan somasi kepada Pemberi Personal Guaranty PT Sekar Langit (Mariana Darmasari) dan mengingatkan konsekwensi sebagai Pemberi personal Guaranty (Penjamin) yang dapat diminta pertanggung jawabannya sampai harta pribadi
 - 3) Dewan komisaris mengingatkan untuk selalu memegang teguh prinsip kehati hatian dan memperhatikan prinsip pemberian pembiayaan yang sehat
- Nasehat Dewan Komisaris untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 13 November 2024 :
 - 1) Dekom meminta dibuatkan simulasi/proyeksi NPF di akhir Des 2024 dan laporan atau system informasi terhadap proses pencairan
- Nasehat Dewan Komisaris untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 10 Desember 2024 :
 - 1) Harap diperhatikan saran dan rekomendasi dari KAP yang saat ini sedang melakukan pemeriksaan (audit) laporan keuangan

3) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Hal yang menjadi Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DPS	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	SUHERMAN ROSYIDI	KETUA DEWAN PENGAWAS SYARIAH	1) Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan Bank 2) Mengawasi kegiatan Syariah Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah yang berlaku 3) Menasehati dan Memberi saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah



			<ol style="list-style-type: none"> 4) Menjadi mediator antara Bank dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Bank yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional 5) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank melalui opini syariah 6) Mengawasi dan memberikan opini syariah terhadap proses pengembangan produk baru yang dikeluarkan Bank 7) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwanya 8) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank 9) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya 10) Dalam melakukan pengawasan, DPS wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis BPR Syariah yang terkait dengan penerapan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS 11) DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran. 12) DPS dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan pelanggaran Prinsip Syariah yang signifikan.
2	AMIN WAHYUDI	ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH	Membantu Ketua Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan Tugas dan tanggung jawabnya

REKOMENDASI PENERAPAN PRINSIP SYARIAH KEPADA DIREKSI

- Nasehat DPS untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat DPS 16 Januari 2024
 1. Direksi, dalam mempertimbangkan untuk memberikan penyaluran dana bagi pengajuan pembiayaan sindikasi, hendaknya memastikan pembiayaannya, dan jadwal angsurannya sesuai dengan akadnya, memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dan apabila tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dan tidak sesuai akad syariah, lebih baik tidak memberikan dana.
 2. Dalam memberikan penyaluran dana bagi Perusahaan yang menjalankan kegiatan berdasarkan Order Kerja, DPS menyarankan menggunakan akad Murabahah, dengan pertimbangan keamanan dan kehati-hatian.
- Nasehat DPS untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat DPS 22 Februari 2024
 1. Dalam proses persetujuan pengajuan pembiayaan nasabah, panitia pembiayaan hendaknya memperhatikan Kehalalan Usaha Nasabah dan barang yang akan diperjualbelikan dengan nasabah.

2. Dalil asalnya, yang mencatat dan membacakan Akad pencairan adalah nasabah selaku pihak yang berhutang, sesuai dengan QS Al Baqarah 282. Namun, setidaknya, meskipun hal itu tidak bias dilakukan, nasabah tersebut harus tau dan jelas apa yang sudah tertulis di surat perjanjian akad
- Nasehat DPS untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat DPS 15 Mei 2024
 1. Seorang karyawan jika ingin bekerja dengan baik maka harus punya rasa melu Handarbeni yaitu rasa memiliki dan bertanggung jawab, berkontribusi untuk perusahaan baik itu dari non staff / Staff sampai pimpinan paling tinggi sehingga visi misi perusahaan akan tercapai serta dapat menjaga nama baik perusahaan.
 2. Untuk perekrutan karyawan baru bagian marketing disarankan untuk mencari yang IPK nya standart tidak terlalu tinggi, karena kebanyakan mahasiswa yang mempunyai IPK tinggi cenderung berdiam dirumah dan tidak suka bersosialisasi.
 3. Tabungan berhadiah diperbolehkan asal tidak mengurangi bagi hasil atau haknya nasabah. untuk hadiah tersebut dananya bisa diambilkan dari biaya promosi
 - Nasehat DPS untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat DPS tanggal 19 Juni 2024
 1. Spesial rate/ nisbah spesial diperbolehkan asal dengan kesepakatan dua belah pihak dan saling menguntungkan
 2. Untuk pemberian bonus tidak boleh dicantumkan pada saat akad.
 - Nasehat DPS untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat DPS tanggal 17 Juli 2024
 1. Dana TBDSP (Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan) segera didistribusikan dan dimaksimalkan saldo 0 rupiah supaya tidak menjadi beban bagi bank.
 2. Kebijakan Bonus untuk penempatan ke bank lain atau bank mitra akan dibuatkan laporanya tersendiri
 - Nasehat DPS untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat DPS tanggal 16 Oktober 2024
DPS memberi nasehat kepada Direksi supaya Biaya Administrasi Pembiayaan perhitunganya tidak dikaitkan dengan Plafond Pembiayaan
 - Nasehat DPS untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat DPS tanggal 17 Desember 2024
Pesan dari OJK harus dipenuhi dimana untuk pertemuan harus selalu ada

LAPORAN HASIL PENGAWASAN DPS SEMESTER1		LAPORAN HASIL PENGAWASAN DPS SEMESTER2	
NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL
002/BPRS-AS/DPS/VII/2024	17 Juli 2024	001/BPRS-AS/DPS/I/2025	31 Januari 2025

4) **PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE**

Pada tahun 2024 belum dibentuk Komite

B. HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

1) **MATRIKS PERINGKAT DAN TAHAPAN PENILAIAN (SELF ASSESSMENT)**

a. **MATRIKS PERINGKAT FAKTOR TATA KELOLA YANG BAIK**

1) Peringkat 1

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Sangat Baik.

2) Peringkat 2

- Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik.
- 3) Peringkat 3
Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Cukup Baik.
 - 4) Peringkat 4
Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Kurang Baik.
 - 5) Peringkat 5
Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Tidak Baik.

b. TAHAPAN/PROSES PENILAIAN

Tahapan yang dilakukan untuk memperoleh hasil penilaian terdiri dari 3 tahap, yaitu :

1. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola.
2. Menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas aspek-aspek governance dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas.
3. Menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek governance.

2) HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

Berdasarkan metode dan tahapan self assessment di atas, kesimpulan dan peringkat pelaksanaan Tata Kelola di BPR Syariah Amanah Sejahtera untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

NO	FAKTOR	S	P	H	S+P+H	TOTAL PENILAIAN FAKTOR
1	FAKTOR 1: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	0.57	0.40	0.14	1.11	0.22
2	FAKTOR 2: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	0.67	0.40	0.10	1.17	0.18
3	FAKTOR 3: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS	0.50	0.40	0.10	1.00	0.10
4	FAKTOR 4: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	FAKTOR 5: PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN BPRSYARIAH	0.50	0.40	0.15	1.05	0.08
6	FAKTOR 6: PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	0.50	0.40	0.10	1.00	0.08
7	FAKTOR 7.A: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	0.50	0.60	0.17	1.27	0.10
8	FAKTOR 7.B: PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	0.50	0.50	0.13	1.13	0.08



9	FAKTOR 7.C: PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	0.50	0.40	0.10	1.00	0.03
10	FAKTOR 8: PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	0.67	0.51	0.10	1.28	0.10
11	FAKTOR 9: BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA	0.50	0.40	0.10	1.00	0.05
12	FAKTOR 10: RENCANA BISNIS BPRSYARIAH	0.50	0.40	0.10	1.00	0.05
13	FAKTOR 11: TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	0.50	0.40	0.10	1.00	0.05
NILAI						1,1
PERINGKAT						1

KETERANGAN :

S : STRUKTUR

P : PROSES

H : HASIL

KESIMPULAN		
HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR SYARIAH AMANAH SEJAHTERA		
NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT	DEFINISI PERINGKAT
1,1	SANGAT BAIK	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Sangat Baik, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Tata Kelola yang sangat memadai dan hanya terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
ANALISIS		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pada tahun 2024, Pemegang saham Bank Memiliki komitmen untuk menambah setoran Modal. 2. Bank telah dapat memenuhi kewajiban terhadap ketentuan OJK dengan pemenuhan komposisi Direksi, Komisaris dan DPS, serta pemenuhan satuan kerja yang terkait. 3. Independensi Pengurus Bank berkaitan dengan tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, rangkap jabatan, sebagian besar sudah sesuai dengan standar OJK sehingga mengurangi potensi terjadinya benturan kepentingan yang terjadi dalam Bank. 4. Perusahaan telah menunjuk Komite di bawah Direksi, yaitu Komite Manajemen Risiko dan Komite Pembiayaan 5. SDI terutama yang bertugas pada Bagian Kepatuhan, Internal Audit, penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS dibekali dengan pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah. 6. Perusahaan senantiasa berusaha menciptakan Budaya Kepatuhan dan sadar resiko dalam setiap lini jabatan. 7. Penyusunan Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris dan dievaluasi dalam pelaksanaannya. 8. Transparansi Laporan Keuangan ditunjukkan dengan mengirimkan Laporan Bulanan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. 		

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI :

Berikut ini adalah tabel mengenai kepemilikan saham anggota Direksi pada PT BPR Syariah Amanah Sejahtera.

NO	NAMA ANGGOTA DIREKSI	KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI			
		BPRSYA YANG BERSANGKUTAN		PERUSAHAAN LAIN	
		NOMINAL SAHAM (Rp.)	PRESENTASE KEPEMILIKAN (%)	NAMA PERUSAHAAN	PRESENTASE KEPEMILIKAN (%)
1	MUSTAFA RIDHO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	RISMARINI	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN KEKELUARGAAN ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPRSYARIAH YANG BERSANGKUTAN

Berikut ini adalah tabel yang menyatakan hubungan kekeluargaan dan hubungan keuangan antara Direksi dengan anggota Direksi lainnya, pemegang saham pengendali dan anggota Dewan Komisaris.

1. HUBUNGAN KEUANGAN

DIREKSI	HUBUNGAN KEUANGAN		
	PEMEGANG SAHAM BPRSYARIAH AS	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPRSYA AS	ANGGOTA DIREKSI LAIN BPRSYARIAH AS
MUSTAFA RIDHO	NIHIL	NIHIL	NIHIL
RISMARINI	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2. HUBUNGAN KEKELUARGAAN

DIREKSI	HUBUNGAN KEKELUARGAAN		
	PEMEGANG SAHAM BPRSYARIAH AS	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPRSYA AS	ANGGOTA DIREKSI LAIN BPRSYARIAH AS
MUSTAFA RIDHO	AMAT OEMAR ASNAR	AMAT OEMAR ASNAR	NIHIL
RISMARINI	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Catatan :

- Komisaris Utama yaitu Bapak Amat Oemar Asnar merupakan suami dari Saudara kandung Orang Tua dari Direktur Utama yaitu Bapak Mustafa Ridho.

E. RANGKAP JABATAN DIREKSI PADA BPR, BPR SYARIAH LAIN, DAN/ATAU LEMBAGA ATAU PERUSAHAAN LAIN

Dalam rangka penerapan prinsip Transparency dan Independency dalam pelaksanaan GCG, seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan rangkap jabatannya, sebagaimana tabel berikut :

NAMA DIREKSI	NAMA LEMBAGA KEUANGAN DAN ATAU PERUSAHAAN LAIN DIMANA KAMI MENJABAT	NAMA JABATAN
MUSTAFA RIDHO	NIHIL	NIHIL
RISMARINI	NIHIL	NIHIL

F. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS PADA BPR SYARIAH YANG BERSANGKUTAN DAN PERUSAHAAN LAIN

Berikut ini adalah tabel mengenai kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Syariah Amanah Sejahtera.

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS			
		BPRSYA YANG BERSANGKUTAN		PERUSAHAAN LAIN	
		NOMINAL (Rp.)	PRESENTASE KEPEMILIKAN	NAMA PERUSAHAAN	PRESENTASE KEPEMILIKAN
1	AMAT OEMAR ASNAR	Rp. 820.500.000	12.58%	1. PT PIRANTI SARANA SEHAT SEJAHTERA 2. PT SARANA SEHAT UTAMA 3. PT SARANA SEHAT LAMONGAN 4. PT. SARANA SEHAT OPTIK	2.65% 50% 1% 1%
2	MOCH ALI MUCHID	Rp. 122.200.000	1.87%	NIHIL	NIHIL

G. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KEKELUARGAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR SYARIAH YANG BERSANGKUTAN

Berikut ini adalah tabel yang menyatakan hubungan kekeluargaan dan hubungan keuangan antara Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham dan anggota Direksi.

1) HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN		
		PEMEGANG SAHAM BPRSYA AS	DEWAN KOMISARIS LAIN DI BPRSYA AS	DIREKSI BPRSYARIAH AS
1	AMAT OEMAR ASNAR	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	MOCH ALI MUCHID	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2) HUBUNGAN KEKELUARGAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KEKELUARGAAN DENGAN		
		PEMEGANG SAHAM BPRSYA AS	DEWAN KOMISARIS LAIN DI BPRSYA AS	DIREKSI BPRSYARIAH AS
1	AMAT OEMAR ASNAR	NIHIL	NIHIL	MUSTAFA RIDHO
2	MOCH ALI MUCHID	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Catatan :

- Komisaris Utama yaitu Bapak Amat Oemar Asnar merupakan suami dari Saudara kandung Orang Tua dari Direktur Utama yaitu Bapak Mustafa Ridho.

H. RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS PADA BPR, BPR SYARIAH LAIN, DAN/ATAU LEMBAGA ATAU PERUSAHAAN LAIN

Dalam rangka penerapan prinsip Transparency dan Independency dalam pelaksanaan GCG, seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan rangkap jabatannya pada tabel berikut :

NO	DEWAN KOMISARIS	NAMA PERUSAHAAN/ LEMBAGA LAIN	JABATAN
1	AMAT OEMAR ASNAR	PT SARANA SEHAT UTAMA	KOMISARIS UTAMA
2	MOCH ALI MUCHID	NIHIL	NIHIL

I. RANGKAP JABATAN ANGGOTA DPS SEBAGAI ANGGOTA DPS PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH LAIN

Dalam rangka penerapan prinsip Transparency dan Professional pada pelaksanaan GCG, masing-masing DPS telah mengungkapkan rangkap jabatannya, sebagaimana tabel berikut:

NO	NAMA DPS	NAMA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH LAIN	JABATAN
1	SUHERMAN ROSYIDI	NIHIL	NIHIL
2	AMIN WAHYUDI	BPR SYARIAH AI MABRUR PONOROGO	DPS

J. HUBUNGAN KEKELUARGAAN ANGGOTA DPS

NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KEKELUARGAAN DAN BENTUK HUBUNGANNYA DENGAN		
	ANGGOTA DPS LAINNYA	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	ANGGOTA DIREKSI
SUHERMAN ROSYIDI	--	--	--
AMIN WAHYUDI	--	--	--

K. PAKET ATAU KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DPS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN KETENTUAN RUPS

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi dan jumlah anggota DPS serta jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima selama periode Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

SEMESTER 1 TAHUN 2024						
REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		DPS	
	ORANG	NOMINAL (Rp)	ORANG	NOMINAL (Rp)	ORANG	NOMINAL (Rp)
REMUNERASI						
Gaji Pokok	2	285.000.000,-	2	135.000.000,-	2	54.000.000,-
Tunjangan	2	103.557.809,-	2	27.828.443,-	2	9.000.000,-
Tantiem	-	-	-	-	-	-
Bonus	2	23.750.000,-	2	11.250.000,-	2	4.500.000,-
Kompensasi Berbasis Saham	-	-	-	-	-	-
Remunerasi Lainnya	-	-	-	-	-	-
FASILITAS LAIN DALAM BENTUK NATURA						
Perumahan	-	-	-	-	-	-
Transportasi	2	Mobil Dinas Pribadi	2	Fasilitas antar jemput ke kantor atau diganti uang transport	2	Fasilitas antar jemput ke kantor atau diganti uang transport
Tunjangan Purna Jabatan	-	-	-	-	-	-
Asuransi Kesehatan	2		-	0	-	0

SEMESTER 2 TAHUN 2024						
REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		DPS	
	ORANG	NOMINAL (Rp)	ORANG	NOMINAL (Rp)	ORANG	NOMINAL (Rp)
REMUNERASI						
Gaji Pokok	2	285.000.000,-	2	135.000.000,-	2	54.000.000,-
Tunjangan	2	55.978.965,-	2	5.302.346,-	-	-
Tantiem	-	-	-	-	-	-
Bonus	-	-	-	-	-	-
Kompensasi Berbasis Saham	-	-	-	-	-	-
Remunerasi Lainnya	-	-	-	-	-	-
FASILITAS LAIN DALAM BENTUK NATURA						
Perumahan	-	-	-	-	-	-
Transportasi	2	Mobil Dinas Pribadi	2	Fasilitas antar jemput ke kantor atau diganti uang transport	2	Fasilitas antar jemput ke kantor atau diganti uang transport
Tunjangan Purna Jabatan	-	-	-	-	-	-
Asuransi Kesehatan	-	-	-	-	-	-

Catatan :

- Yang dimaksud dengan tunjangan di sini adalah Tunjangan Hari Raya, Tunjangan PPh 21 dan Tunjangan BPJS

L. KEPEMILIKAN SAHAM PARA PEMEGANG SAHAM PADA BPR SYARIAH YANG BERSANGKUTAN PADA TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

Berikut ini adalah tabel mengenai kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Syariah Amanah Sejahtera.

NO	NAMA PEMEGANG SAHAM	PROSENTASE SAHAM PER 31 DESEMBER 2024	PROSENTASE SAHAM PER 31 DESEMBER 2023
1	Rachmad Muhamadiyah	30.62%	28.46%
2	Amat Oemar Asnar, Ir.	12.58%	9.63%
3	Yudha Ramadhan	9.77%	7.73%
4	Drs. H. Afghon Anjasmoro, MM.	6.98%	7.56%
5	Alfie Rahman	0.08%	0.00%
6	Ir. H. Djoko Soesilo	7.76%	6.74%
7	Erna Triamini	8.08%	6.28%
8	Amirul Djujus Aziz	4.34%	5.53%
9	H. Abdullah Achmad, SE	4.06%	4.40%
10	Drs. H. Moh Sulthon Amien	0.08%	3.51%
11	DR.Ir. Achmad Zubaydi, ME	5.64%	3.80%

12	H. Mochamad Ali Muchid, SE	1.87%	1.45%
13	Rachmat Qomaruddin	1.34%	1.31%
14	H. Muhammad Saji, SH	1.01%	0.95%
15	H. Usman Zuhri	1.12%	1.05%
16	Dr. Ali Faisal	0.00%	0.79%
17	Siti Muifah	0.93%	0.83%
18	Drs. Suwadji	0.89%	0.60%
19	Drs. H. Bulpandi, Ak., M.M	0.82%	0.62%
20	Mohamad Rofi'uddin	0.57%	0.56%
21	Muhammad Mukharom	0.36%	0.36%
22	Elvi Mahsusiyah	0.32%	0.35%
23	H. Abdul Latief Asyhari	0.23%	0.25%
24	Nasrul Ulumiyah, S.Kep., Ns.	0.38%	0.29%
25	H. Adam Baswedan	0.15%	0.17%
26	H. Mohamad Munif Miachas, BA	0.02%	0.02%
27	Drs. H. Sugeng	0.00%	6.76%

M. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Pegawai yang dimaksud adalah pegawai tetap BPR Syariah Amanah Sejahtera sampai dengan pelaksana. Pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah pada periode Tahun 2024 adalah sebagaimana skala perbandingan dalam tabel berikut :

RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH SEMESTER 1

NO	URAIAN	RASIO 2024
1	Rasio Gaji anggota Direksi tertinggi terhadap Gaji anggota Direksi terendah	111%
2	Rasio Gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap Gaji anggota Dewan Komisaris terendah	125%
3	Rasio Gaji anggota DPS tertinggi terhadap Gaji anggota DPS terendah	125%
4	Rasio Gaji Pegawai tertinggi terhadap Gaji Pegawai terendah	399%
5	Rasio Gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap Gaji anggota Direksi tertinggi	50%
6	Rasio Gaji pegawai tertinggi terhadap Gaji anggota Direksi tertinggi	38%

RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH SEMESTER 2

NO	URAIAN	RASIO 2024
1	Rasio Gaji anggota Direksi tertinggi terhadap Gaji anggota Direksi terendah	111%
2	Rasio Gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap Gaji anggota Dewan Komisaris terendah	125%
3	Rasio Gaji anggota DPS tertinggi terhadap Gaji anggota DPS terendah	125%
4	Rasio Gaji Pegawai tertinggi terhadap Gaji Pegawai terendah	358%
5	Rasio Gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap Gaji anggota Direksi tertinggi	50%
6	Rasio Gaji pegawai tertinggi terhadap Gaji anggota Direksi tertinggi	36%

Catatan :

- Yang dimaksud dengan gaji pegawai adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dalam kebijakan perusahaan
- Yang dimaksud Pegawai adalah pegawai tetap dan kontrak sampai dengan level pelaksana

N. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dalam upaya untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan operasional Bank, Dewan Komisaris selama periode Tahun 2024 melaksanakan rapat dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat tanpa mengesampingkan terjadinya dinamika yang terjadi selama rapat dengan rincian sebagai berikut :

1. PENYELENGGARAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN

NO	TANGGAL RAPAT	JUMLAH PESERTA	AGENDA RAPAT
SEMESTER 1			
1	16 JANUARI 2024	2	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi terhadap realisasi kinerja tahun 2023 • Draft Laporan tata kelola perusahaan tahun 2023
2	13 FEBRUARI 2024	2	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham
3	21 MEI 2024	2	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja s.d. Mei 2024 • Penarikan jaminan a.n Sekar Langit • Membagikan deviden pesaham sesuai putusan RUPS • Penawaran simpanan guna menambah modal disetor Rp.500.000.000
SEMESTER 2			
4	24 JULI 2024	2	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Performace Perusahaan sem 1 Tahun 2024 • Tingkat kesehatan bank semester 1 Tahun 2024
5	21 AGUSTUS 2024	2	<ul style="list-style-type: none"> • Disposisi terhadap laporan bulanan • Evaluasi pembiayaan waad • Persiapan audit OJK 2024
6	13 NOVEMBER 2024	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Draft RBB Tahun 2025 • Pproyeksi Akhir Tahun 2024
7	10 DESEMBER 2024	2	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi kinerja tahun 2024 • Laporan pengawasan Dekom Semester II Tahun 2024 • Perisapan RUPS

- *) Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, sehingga kewajiban penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris telah terpenuhi

2. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	FREKUENSI KEHADIRAN		PERSENTASE TINGKAT KEHADIRAN
		FISIK	TELEKONFERENSI	
1	AMAT OEMAR ASNAR	7	0	100%
2	MOCH ALI MUCHID	7	0	100%

O. FREKUENSI RAPAT DPS

Pada tahun 2024, Frekuensi kehadiran DPS dalam rangka pengawasan pelaksanaan Prinsip syariah di perusahaan adalah sebagai berikut :

1. PENYELENGGARAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN :

NO	TANGGAL RAPAT	JUMLAH PESERTA	AGENDA RAPAT
SEMESTER 1			
1	16 JANUARI 2024	2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan semester II Tahun 2023 ▪ Pembiayaan Nasabah PT.DPI ▪ Laporan Tata Kelola
2	22 FEBRUARI 2024	2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan Pembiayaan 2024
3	13 MARET 2024	2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Hasil uji petik masing2 kantor cabang
4	24 APRIL 2024	2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengenai draft rencana kebijakan marketing pendanaan dan marketing promosi 2024
5	15 MEI 2024	2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembahasan Pembiayaan Musyarakah
6	19 JUNI 2024	2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membahas mengenai Produk Tabungan dan Deposito
SEMESTER 2			
7	17 JULI 2024	2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil Peemeriksaan DPS Uji Petik ▪ Koreksi untuk Laporan Marketing Bulanan ▪ Opini DPS mengenai Murabahah untuk pelunasan pembelian mobil ▪ Pembiayaan Qardh ▪ Dana TBDSP
8	21 AGUSTUS 2024	2	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan Audit OJK 2024
9	16 OKTOBER 2024	2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil Pra Ijtima Sanawi (Annual Meeting) DPS XX Tahun 2024 ▪ Pembiayaan Umroh
10	17 DESEMBER 2024	2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil seminar pengembangan keuangan syariah 2024 ▪ RBB Tahun 2025

- *) Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat Dewan Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah, sehingga kewajiban penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas Syariah telah terpenuhi.

- *) Dalam rapatnya, Dewan Pengawas Syariah juga mengundang Direksi dan Pejabat lainnya yang akan diminta keterangannya untuk pengawasan syariah dan sosialisasi peraturan syariah.

KEGIATAN LAIN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI LUAR RAPAT

NO	TANGGAL KEGIATAN	JUMLAH PESERTA	AGENDA KEGIATAN
1	25 SEPTEMBER 2024	1	Kunjungan pengawasan Kantor Cabang Lamongan
2	30 OKTOBER 2024	1	Edukasi Literasi dan Bincang Santai di TK Kusuma Jaya, Surabaya
3	06 NOVEMBER 2025	1	Talk show dan Edukasi Literasi Perbankan Syariah di MI IRSYADIYAH
4	19 NOVEMBER 2024	1	Pemeriksaan uji petik masing-masing kantor cabang dan memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya literasi keuangan bersama kantor cabang cerme

- *) Pada September, Oktober dan November 2024, Anggota Dewan Pengawas Syariah melakukan pembagian tugas dimana Ketua DPS bertugas melaksanakan diskusi mengenai ekonomi syariah dengan Nasabah dan Anggota DPS melakukan pemeriksaan di kantor Cabang sehingga tidak dapat hadir dalam waktu yang bersamaan. Namun secara keseluruhan, kehadiran DPS di perusahaan total sebanyak 15 kali dalam satu tahun 2024.

2. KEHADIRAN RAPAT ANGGOTA DPS

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	FREKUENSI KEHADIRAN		PERSENTASE TINGKAT KEHADIRAN
		FISIK	TELEKONFERENSI	
1	SUHERMAN ROSYIDI	10	0	100%
2	AMIN WAHYUDI	10	0	100%

P. JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD)

Selama tahun 2024, terjadi internal fraud di BPR Syariah Amanah Sejahtera, sebagaimana tabel berikut :

NO	INTERNAL FRAUD DALAM 1 TAHUN	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH :		
		DEKOM/ DIREKSI	PEGAWAI TETAP	PEGAWAI TIDAK TETAP
1	TIDAK ADA	0	0	0

Q. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR SYARIAH

Selama periode Tahun 2024, terdapat perkara hukum baik berupa gugatan ataupun yang lainnya. Sebagaimana tabel berikut :

No	PERKARA HUKUM	Jumlah (Satuan)	
		Perdata	Pidana
1	TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP	1	0
2	DALAM PROSES PENYELESAIAN	0	0
	TOTAL	1	0

- *) Telah keluar putusan pengadilan agama bahwa gugatan dari nasabah dinyatakan dibatalkan oleh Pengadilan agama

R. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2024, Transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah sebagai berikut :

NO	PIHAK YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN		PENGAMBILAN KEPUTUSAN		JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI	PENJELASAN
	NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN			
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

S. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Selama tahun 2024 BPR Syariah Amanah Sejahtera telah menyalurkan dana sosial sebesar Rp.67.533.314,- dan tidak menyalurkan dana untuk jenis kegiatan Poitik apapun. Rinciannya sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN	PENERIMA	NOMINAL
1	20240125	01	SUMBANGAN PRIMKOVERI	PRIMKOVERI LAMONGAN	50.000,-
2	20240131	01	SANTUNAN ANAK YATIM	ANAK YATIM DARI YAYASAN NURUL HAYAT	10.200.000,-
3	20240305	01	PENYALURAN DANA ZAKAT	YAYASAN NURUL HAYAT	10.654.111,-
4	20240315	01	4 PAKET BUKA PUASA CERIA	YAYASAN YATIM MANDIRI	600.000,-
5	20250315	01	BANTUAN BENCANA BANJIR SAMPANG MADURA	DISALURKAN MELALUI BPRS BAKTI ARTHA SEJAHTERA	1.000.000,-
6	20240322	01	PONDOK RMADHAN SDNU KANJENG SEPUH SIDAYU	SD NU KANJENG SEPUH	1.000.000,-
7	20240327	01	DONASI PALESTINA PT BPRS AMANAH SEJAHTERA	KOMPARTEMEN BPRS ASBISINDO	1.000.003,-
8	20240327	01	PEMBAGIAN TAKJIL RAMADHAN	MASYARAKAT DI SEKITAR KANTOR CAB LAMONGAN (JL. PANGLIMA SUDIRMAN, JL. VETERAN DAN SEKITAR ALUN-ALUN LAMONGAN	2.272.000,-
9	20240405	01	BAZAR BERAS MURAH	MASYARAKAT DI SEKITAR WILAYAH KANTOR CAB CERME (KECAMATAN CERME)	3.000.000,-
10	20240419	01	SANTUNAN ANAK YATIM	ANAK YATIM BINAAN YAYASAN NURUL HAYAT GRESIK	9,417.000,-
11	20240419	01	BAZAR BERAS MURAH	MASYARAKAT DI SEKITAR WIALAYH KANTOR PUSAT (KEC. MANYAR GRESIK)	3.000.000,-
12	20240419	01	PEMBAGIAN TAKJIL UNTUK MASYARAKAT	1. MASJID AL HUDA SAMBIKEREK SURABAYA 2. MASJID AINUL YACIN SAMBIKEREK SURABAYA 3. MASJID JAMI' BAITUSSYAKUR MENGANTI GRESIK	1.090.000,-
13	20240522	01	SUMBANGAN BANJIR BANDANG SUMATERA BARAT	ASBISINDO KOMPARTEMEN BPRS	1.119.000,-
14	20240612	01	TRK UNT BANTUAN KEGIATAN PENJUSA	SEKOLAH MI HASYIM AS'ARI	150.000,-
15	20240723	01	SANTUNAN ANAK YATIM	ANAK YATIM BINAAN YAYASAN NURUL HAYAT	10.500.200,-
16	20240813	01	PARTISIPASI KEGIATAN MEMPERINGATI HUT RI KE-79	PANITIA HUT RI KECAMATAN CERME	200.000,-



17	20240815	01	SUMBANGAN KEGIATAN MEMPERINGATI HUT RI KE-79	PANITIA HUT RI KELURAHAN SIDOKUMPUL KAB LAMONGAN	250.000,-
18	20240816	01	SUMBANGAN KEGIATAN MEMPERINGATI HUT RI KE -79	PANITIA HUT RI KECAMATAN SUKOMULYO KAB GRESIK	250.000,-
19	20240826	01	BANTUAN PEMBANGUNAN GEDUNG KELOMPOK BELAJAR ANGGREK	PANITIA PEMBANGUNAN KELOMPOK BELAJAR ANGGREK KAB GRESIK	750.000,-
20	20240905	01	DONASI KEGIATAN PERINGATAN HARI BESAR ISLAM MAULID NABI	SD ISLAM BAITUL FATTAH MANUKAN SURABAYA	400.000,-
21	20240930	01	PENYALUR DANA ZAKAT	LEMBAGA AMIL ZAKAT NURUL HAYAT GRESIK	10.231.000,-
22	20241003	01	SUMBANGAN HUT PURNAWIRAWAN TNI AD	KODIM LAMONGAN	150.000,-
23	20241115	01	DONASI KEGIATAN HARI PAHLAWAN SMPI BAITUL FATTAH	SMPI BAITUL FATTAH	250.000,-
TOTAL					67.533.314,-

Catatan :

Jenis Kegiatan 01 : disalurkan dalam kegiatan social

Jenis Kegiatan 02 : disalurkan dalam kegiatan politik



BAB III PENUTUP

Demikian Laporan Tata Kelola Yang Baik Perusahaan (Good Corporate Governance) PT BPR Syariah Amanah Sejahtera tahun 2024.